

RESOLUSI KONFLIK KOMUNAL ANTARA MASYARAKAT DESA NGALI DAN RENDA KECAMATAN BELO, KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (NTB)

Conflict Resolution Between of Renda Villagers and Ngali, Belo Subdistrict, Bima Regency of The Province of West Nusa Tenggara (NTB)

Arihan ^{*1)}, Ahmad Zuber², Bagus Haryono³

¹*Program Pascasarjana Sosiologi, FISIP, Universitas Sebelas Maret Surakarta,

²FISIP, Universitas Sebelas Maret Surakarta,

³FISIP, Universitas Sebelas Maret Surakarta,

⁾Email: arihan8889@student.uns.ac.id

ABSTRACT

The conflict between villages in Bima Regency involves large masses and have the same identity. Equally the muslim, Tribes of mbojo, and the same Maja labo dahu Cultural. The conflict between the village of Renda with Ngali village in district of Belo Bima Regency forms the social solidarity which the massif of fellow villagers. The results of this research show that; Conflicts between villagers backed by the communal nature of a sense of revenge due to the pride of the villagers who were disturbed by the actions of the other villagers that violates the values, norms and ethics prevailing in the village of Renda and Ngali village, conflict resolution process between villagers Renda and Ngali through several stages; First, the kesepakatan is reached through Deliberation and Consensus with upholding a culture of Maja Labo Dahu. Second, the settlement based on chronological events, the conflict ended by itself when the outcome of the conflict was balanced, it is likely to be temporary. Thirdly, the maintenance of peace with the reconciliation of the regional Government of Bima. A form of conflict resolution with the customary approach of deliberation and Consensus, approach local wisdom Maja labo dahu Culture followed by determination of the sanctions for the perpetrators of the violations. Conflict Research Development measures is urgently needed to bring about the integrity of the nation's peaceful and prosperous future.

Keywords: Ndempa Ndiha traditions, conflict resolution, reconciliation, conflict between villages

ABSTRAK

Konflik antar desa di Kabupaten Bima melibatkan massa yang berjumlah besar, sementara masyarakat memiliki kesamaan latar belakang identitas. Penduduk kabupaten Bima berpenduduk muslim, Suku Mbojo dengan menggunakan bahasa Bima, dan menganut budaya Maja labo dahu. Konflik yang berlangsung diantara desa Renda dengan desa Ngali di kecamatan Belo Kabupaten Bima terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; Konflik antar desa dilatarbelakangi sifat komunal dari rasa dendam akibat harga diri masyarakat desa yang terganggu oleh tindakan dari warga desa lain yang dianggap melanggar nilai, norma dan etika yang berlaku di desa Renda dan Ngali, proses resolusi konflik antar masyarakat desa Ngali dan Renda melalui beberapa tahap; pertama, tercapai kesepakatan damai melalui Musyawarah dan Mufakat dengan menjunjung tinggi nilai Budaya Maja labo dahu. Kedua, penyelesaian berdasarkan kronologis kejadian, konflik berakhir dengan sendirinya ketika hasil konflik berimbang, hal ini cenderung bersifat sementara. Ketiga, pemeliharaan perdamaian dengan rekonsiliasi dari pemerintah daerah Bima. Bentuk resolusi konflik dengan pendekatan adat Musyawarah dan Mufakat (Mbolo ro dampa), pendekatan kearifan lokal Budaya Maja labo dahu yang diikuti dengan penetapan sanksi bagi pelaku pelanggaran. Langkah Pengembangan penelitian konflik sangat dibutuhkan untuk mewujudkan keutuhan bangsa yang damai dan sejahtera kedepanya.

Kata kunci: Resolusi Konflik, Tradisi Ndempa Ndiha, Rekonsiliasi, Konflik antar desa

PENDAHULUAN

Kabupaten Bima secara geografis, kehidupan sosial dan kebudayaan memiliki keunikan yang menarik untuk dianalisis, baik dari sisi historis, ekonomi maupun simbol-simbol sosial lainnya. Salah satunya yaitu kondisi kabupaten Bima yang seringkali mengalami konflik antar desa, Konflik antar desa yang melibatkan kelompok masyarakat yang memiliki budaya, agama dan tradisi yang sama. Bila ditelusuri dalam kajian konflik komunal secara umum yang berlangsung di Indonesia, hampir membingungkan para pengamat konflik. Faktor penyebab konflik bukanlah perbedaan latar belakang agama, budaya, sosial atau Suku. Akan tetapi cenderung dipicu oleh permasalahan kecil.

Kondisi sosial di daerah Bima pasca Orde Baru, mengalami krisis nilai dan "keterisolasian" dari kebudayaannya sendiri. Pemerintahan orde baru membangun pola keberagaman dalam sistem pemerintahan, kebijakan sentralistik pembangunan pemerintah tersebut menimbulkan banyak kekecewaan dari masyarakat Bima. Mulai dari pemilihan kepala daerah, perekrutan PNS, promosi jabatan, dan lain sebagainya banyak didominasi oleh intervensi dari pusat, hal ini membuat potensi-potensi sumber daya di daerah "tersingkirkan", kebudayaan masyarakat dikesampingkan dan munculnya "kecemburuan" elit politik lokal dalam posisi kekuasaan.

Konflik sosial yang berlangsung di masyarakat Bima sendiri tidak bisa dipisahkan dari dampak krisis yang melanda

pada masa Orde Baru sebagaimana terjadi di daerah-daerah lainya. Kebijakan yang tersentralistik dari pemerintah pusat tersebut memberikan keseragaman pola pemerintahan, seperti halnya kepala daerah setingkat Bupati atau Wali kota Bima hampir semuanya diduduki oleh elit politik titipan dari pusat atau keturunan Jawa. Sudah tentu pemahaman mereka atas kebudayaan Bima tidak dimiliki, dan banyak kebijakan-kebijakannya yang bersifat mematikan kebudayaan lokal dengan mengatasnamakan nasionalisme, kesatuan dan kesamaan ditengah keragaman kebudayaan masyarakat. Walaupun demikian, ditengah masyarakat perkotaan yang tengah mengalami transformasi kebudayaan secara tajam, akan tetapi nilai-nilai luhur kebudayaan lokal Bima “*maja labo dahu*” terpelihara dengan baik di wilayah pedalaman dan desa-desa di pelosok pegunungan. Budaya saling menghormati dan menghargai (*maja labo dahu*) yang sebelumnya melekat kuat dalam nilai-nilai kehidupan masyarakat Bima sebagian besar telah mengalami perubahan. Konsep kebudayaan *maja labo dahu* yang sudah tertanam kuat nilai-nilai Islam, memberikan pesan-pesan moral pada masyarakat Bima dalam melaksanakan setiap kegiatan yang ditekuninya. Pudarnya nilai kebudayaan pada masyarakat daerah Bima tidak terlepas dari pengaruh kebijakan sentralistik masa Orde Baru.

Pada kasus konflik di daerah Bima tersebut, cenderung dipicu oleh permasalahan-permasalahan yang bersifat kecil dalam kasat mata, seperti perkelahian pemuda di orkestra/hiburan, perdebatan terkait perbedaan pendapat, permasalahan utang-piutang dan lain sebagainya, yang menyebabkan kematian atau luka berat yang kemudian dituntut oleh pihak keluarga darah dibalas darah atau pertanggung jawaban lainnya yang melibatkan bentrokan antar desa. Kasus konflik desa Renda dan Ngali yang terjadi pada 19 Januari 2009, konflik berawal dari perkelahian pemuda, pemuda desa asal Ngali yang kemudian dibacok oleh pemuda yang diduga warga Renda dengan menggunakan senjata tajam, kemudian disusul oleh respon pihak keluarga untuk meminta pertanggung jawaban kepada pelaku, ketika tuntutan tidak mendapatkan respon baik, kemudian diikuti oleh rentetan tindakan lainnya, seperti penghadangan jalan oleh warga desa Renda untuk mencari warga desa Ngali, begitu juga sebaliknya sikap warga Ngali.

Sebagaimana dampak langsung dari terkikisnya nilai-nilai budaya *maja labo dahu* dan kearifan lokal tersebut, berkembangnya pola konflik sosial yang bersifat komunal. Konflik sosial tersebut merupakan konflik yang berlangsung dalam kurun waktu yang berkepanjangan dan terjadi (ledakan konflik) dalam waktu yang singkat, akan tetapi memiliki dampak yang membias dan berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat Bima. Diantara konflik-konflik sosial yang mengakar secara kuat pada masyarakat Bima yaitu konflik yang berlangsung antara warga desa Ngali dan Renda, hingga saat ini konflik tersebut belum benar-benar berakhir semenjak berhenti pada akhir tahun 2012, dan berpotensi kembali muncul ketika dipicu oleh faktor yang tepat. Konflik kedua desa tersebut pada umumnya masyarakat Bima beranggapan bahwa konflik kedua desa tersebut adalah konflik yang pertama kali muncul di kabupaten Bima yang disusul oleh konflik antar warga di berbagai tempat lainnya. Keberlanjutan dari konflik ini dapat dilihat melalui berkembangnya pola imitasi kekerasan sosial dan meningkatnya skala tindak kriminal lainnya didalam kehidupan masyarakat Bima. Konflik antar warga desa tersebut berlangsung dalam kurun waktu tertentu secara tiba-tiba, warga yang terlibat konflik hingga memakan banyak korban, mulai dari korban jiwa hingga korban materil dan berujung pada pembakaran kampung desa yang berkonflik.

Sejarah konflik rakyat pertama di Bima berlangsung sejak

tahun 1908-1910, pada masa kesultanan Bima Sultan Ibrahim. Konflik itu diawali oleh peristiwa perlawanan rakyat Bima atas kolonialisme Belanda yang berlangsung selama tahun 1908-1910 (Perang Ngali, Dena, dan Kala) dan hingga sekarang masih menyisahkan konflik antar desa yang berkelanjutan. Perjuangan masyarakat desa Ngali dalam melawan penjajahan Belanda dengan mengatasnamakan mempertahankan “wibawah Sultan Bima”, pada akhirnya dimenangkan oleh pihak Belanda yang didukung oleh pasukan kesultanan Bima. Kekalahan rakyat pada perlawanan rakyat ini berakibat fatal bagi masyarakat desa Dena, Donggo Kala, desa Ngali dan desa-desa lainnya yang terlibat dalam perlawanan atas kolonial Belanda di Bima. Hukuman atas tindakan pemberontakan tersebut yaitu harus menanggung hukuman pembuangan tokoh-tokoh rakyat dan penyitaan harta benda dan tanah adat milik warga desa oleh Belanda dijadikan sebagai harta rampasan perang. Sementara tanah adat desa yang dianggap memberontak, dibagikan kepada warga desa lain yang dianggap berjasa dalam membantu Belanda selama berlangsungnya perlawanan rakyat. Sejarah panjang perjuangan rakyat pedesaan dalam merebut kembali hak-haknya tersebut hingga pada akhirnya terbentuk sebuah kebiasaan yang disebut tradisi *ndempa ndiha*/ perkelahian massal (Tajib, 1995).

Tradisi *ndempa* tersebut dilaksanakan oleh rakyat layaknya turnamen atau hiburan rakyat, dan hanya dilaksanakan pada waktu tertentu yaitu ketika selesai musim panen (panen padi). Turnamen perkelahian massal dalam tradisi *ndempa* tersebut setidaknya melibatkan empat desa, yaitu desa Ngali, Renda, Sakuru, dan Monta yang ikut disaksikan oleh semua penduduk desa, laki-laki dan pemuda dari keempat desa tersebut dengan aturan main yang cukup sederhana. Peserta harus menjunjung tinggi kehormatan perempuan, peserta dalam posisi duduk tidak boleh diganggu, tidak boleh memakai senjata, dan peserta yang meninggal dunia pada saat turnamen, keluarga tidak diperbolehkan menuntut. Tradisi *ndempa* tersebut berangsur-angsur menghilang sekitar tahun 1950-an (Tajib, 1995: 270). Masyarakat umum di Bima banyak yang memandang bahwa konflik sosial yang berlangsung di desa Ngali dan desa Renda diawali oleh tradisi tersebut.

Konflik sosial yang berlangsung di desa Ngali dan desa Renda telah terjadi dalam beberapa periode; Pertama, konflik di tahun 1909-1911, konflik komunal ini dikarenakan pengaruh dendam akibat kekalahan rakyat Ngali melawan Belanda. Kedua, terjadi pada tahun 1911-1970 terjadi antara desa Ngali dengan desa lainnya lewat turnamen tradisi *Ndempa Ndiha*. Ketiga, konflik antara pemuda dengan menggunakan senjata-senjata tajam yang berlangsung pada tahun 1971-1991. Keempat, terjadi pada tahun 1991 hingga tahun 2012, konflik terjadi antar desa dengan menggunakan senjata api (senpi rakitan), konflik yang memakan korban yang cukup banyak.

Akar masalah dari konflik Renda dan Ngali secara *laten*, telah terbentuk dari tradisi *Ndempa ndiha* (perkelahian massal) tersebut yang kemudian membentuk sebuah bentuk karakter pemuda yang merasa tangguh, dan berjiwa pahlawan (Superior) atau sejenisnya ditengah masyarakat. Hal ini pada umumnya cenderung dilindungi dan dijalankan secara bersama-sama oleh sekelompok pemuda atau masyarakat sebagai nilai persatuan atau solidaritas yang saling mengikat untuk melindungi antara satu dengan yang lainnya. Walaupun tradisi tersebut berjiwa mengakar dalam karakter masyarakat Bima, akan tetapi diikat kuat lagi oleh nilai budaya *maja labo dahu* yaitu saling menghormati dan menghargai antar sesama. Menghargai dan menghormati yang tua sudah menjadi tradisi yang melekat kuat di tengah masyarakat Bima khususnya masyarakat desa Renda dan Ngali. Konflik di masyarakat desa Renda dan desa

Ngali merupakan hasil transformasi konflik dari tradisi *ndempa* yang diartikan sebagai semangat kejujuran, keterbukaan, dan patriotisme juga mengungkapkannya bahwa (Muhlis, 2013).

Konflik yang terjadi di masyarakat Renda dan Ngali cenderung masyarakat “terprovokatif” oleh kondisi yang tidak terkendali. Penyelesaian konflik sosial yang berlangsung selama ini oleh pemerintah yaitu dengan menyalurkan tenaga kepolisian dan militer untuk meredakan konflik. Bentuk penanganan konflik di kabupaten Bima selama ini cenderung bersifat sementara. Kecenderungan pemerintah kabupaten Bima dalam mengambil tindakan meredakan konflik seperti halnya sikap panik menghadapi kobaran api kebakaran, sementara disisi lain mengabaikan untuk memperbaiki sumber dari kebakaran itu. Penanganan konflik dengan penyaluran tenaga Kepolisian, BRIMOB, TNI, dan Pihak-pihak keamanan lainnya “diklaim” sebagai langkah utama dalam menangani konflik. Tindakan pihak kepolisian lebih cenderung menekankan pada permasalahan hukum dan bertindak menyelesaikan masalah ketika tengah bersifat destruktif (menghancurkan). Pola penyelesaian masalah yang seperti itu, kecenderungan mengabaikan karakteristik budaya, latarbelakang sosial, dan permasalahan-permasalahan yang bersifat laten lainnya (M. Nasir, 2013).

Penyelesaian konflik oleh pemerintah dan pihak keamanan masih sebatas pada pendekatan hukum dan konvensional, pemerintah memandang bahwa konflik antar desa sebagai masalah kriminal semata dan cenderung menyelesaikan konflik melalui pihak kepolisian dengan melibatkan kedua belah pihak saja yaitu pihak yang bertikai dan melibatkan keluarga atau orang tua masing-masing (Ilyas, 2014). Hal ini tidak sesuai dengan nilai budaya yang tercermin lewat budaya *maja labo dahu* yang telah mengakar pada kehidupan masyarakat Bima sejak dahulu, budaya yang seharusnya membimbing masyarakat akan penting saling menghormati dan menghargai antar sesama, seakan telah dilupakan oleh masyarakat lebih-lebih pemerintah sebagai pucuk kekuasaan dalam menciptakan kehidupan yang damai, adil, dan sejahtera.

Konflik yang terjadi di kabupaten dan kota Bima bila ditelusuri dari perspektif homogenitas sosial budaya, karena masyarakat yang terlibat konflik memiliki identitas sosial budaya yang berlatar belakang sama, yaitu sama-sama beragama Islam, dengan sama-sama dari Suku Mbojo, dan berprofesi sebagai masyarakat Petani. Bahkan pihak yang terlibat dalam konflik masih terikat dalam ikatan keluarga dan kerabat yang masih dekat. Penyelesaian konflik lebih bergantung pada mekanisme formal untuk arbitrase dan adjudikasi (Sanginga, 2007).

Upaya resolusi konflik etnis melalui rapat koordinasi dengan melibatkan berbagai tokoh etnis yang ada, meningkatkan komunikasi budaya antar kedua etnis, mewaspadai berbagai bentuk isu dan provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, agar tetap menjaga rasa aman, dan kembali menjalin hubungan yang harmonis, saling pengertian dan toleransi (Iskandar, 2010). Penyelesaian konflik dengan membangun tokoh sosial, konflik terjadi akibat krisis ketokohan dalam masyarakat, konflik dapat diselesaikan dengan menguatnya modal sosial masyarakat (Eka Hendry, 2013).

Penyelesaian konflik melalui Rekonsiliasi adalah proses yang berkelanjutan menggantikan antagonis kenangan dengan kenangan obligasi dan sosial sebelumnya mengganti sejarah kekerasan berkenaan dengan pembunuhan saudara dalam sejarah yang mengingatkan praktik lama yang mengutuk atas tindakan yang menghilangnya nyawa manusia (Kimberly Theidon, 2006). Permasalahan yang kemudian muncul adalah jika konflik

merupakan realitas dari kehidupan sosial yang sering terjadi dalam masyarakat daerah yang tengah mengalami transisi pembangunan, lantas bagaimana langkah kita dalam menemukan resolusi konfliknya?.

Oleh karena demikian, berangkat dari fenomena sosial tersebut, peneliti berupaya untuk mengabdikan diri secara akademik untuk mengangkat judul penelitian tentang Resolusi Konflik Antara Masyarakat Desa Renda dan Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Peneliti memandang, bahwa konflik yang terjadi di kedua desa tersebut menjadi ikon dan stimulus bagi munculnya konflik-konflik di desa-desa lainnya di kabupaten dan kota Bima. Peneliti berupaya melaksanakan aktivitas akademis yang dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, lebih khususnya masyarakat daerah Bima, dalam hal ini masyarakat desa yang tengah mengalami transisi pembangunan dan sedang dilanda konflik sosial.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, Sebagaimana menurut Sutopo, peneliti menekankan catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, dan mendalam yang menggambarkan situasi sebenarnya guna mendukung penyajian data (Sutopo, 2006:40). Penelitian kualitatif yaitu sebagai sebuah metode yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2006:3). Penelitian deskriptif kualitatif berusaha untuk memahami makna dari berbagai peristiwa dan interaksi manusia didalam situasinya yang khusus (Sutopo, 2006:27).

Lokasi penelitian ini bertempat di desa Ngali dan desa Renda kecamatan Belo, kabupaten Bima, provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Tempat penelitian ini disesuaikan dengan kondisi dan keadaan sosial berlangsungnya konflik dan resolusi konflik masyarakat Bima. Pencatatan sumber data melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan secara sadar, terarah, dan fokus dengan tujuan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan.

Narasumber dalam penelitian ini berjumlah 16 (delapan) orang, narasumber yang terdiri dari 8 (empat) orang tokoh masyarakat warga desa Renda, dan 8 (empat) orang narasumber dari tokoh masyarakat warga desa Ngali. Triangulasi sumber dalam penelitian ini menggunakan 4 (empat) triangulasi yang terdiri dari: (1) Pemerintah daerah/kecamatan Belo kabupaten Bima, (2) Kepolisian Resort Kabupaten Bima/sector kecamatan Belo, (3) LSM/Bapermas kabupaten Bima, (4) Dosen/aktivis Akademisi kabupaten Bima, (5) Tokoh agam Adat masyarakat Bima.

Teknik pengambilan data dengan melakukan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Pemilihan informan dengan teknik *purposive sampling* diklasifikasi berdasarkan Pengaruh, dan Peranan tokoh masyarakat dalam Resolusi konflik desa Ngali dan desa Renda. Validitas data dengan menggunakan teknik triangulasi sumber, dan dengan menggunakan model analisis interaktif *Milles dan Huberman* yaitu dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data (*data reduction*), Penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/ verification*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Sosial Geografis Daerah Bima

Secara geografis daerah Bima terdiri dari wilayah pesisir yang

berbatasan langsung dengan luasnya hamparan laut, terdiri dari 18 kecamatan dan masing-masing kecamatan memiliki jarak lebih kurang 130 km sampai 250 km. Terdapat dua kecamatan yang dipisahkan oleh perbatasan daerah Dompu, yaitu kecamatan Tambora terletak pada ketinggian 10.00 dpl sementara kecamatan Sanggar 19.00 dpl. Kecamatan yang terletak didataran tinggi yaitu, 714.00 dpl kecamatan Donggo, kecamatan Lambitu dengan ketinggian 634.00 dpl, sementara kecamatan Wawo dengan ketinggian 391.00 dpl yang menjadikan wilayah kecamatan Wawo tertinggi ketiga dari kecamatan Donggo dan Lambitu. Kecamatan Parado berada di ketinggian 252.00 dpl, dan kecamatan Wera dengan ketinggian 57.00 dpl.

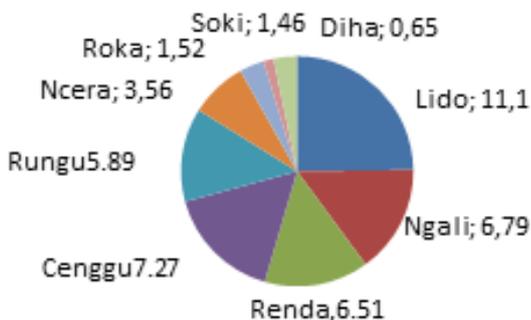


Gambar 1.1: Peta Lokasi Penelitian

Suku Asli Masyarakat Bima yaitu suku *Mbojo*, selain suku asli mbojo masyarakat Bima juga telah mengalami pembauran dengan suku-suku pendatang lainnya, suku pendatang tersebut diantaranya: Suku orang-orang dari Makasar-Bugis, Suku Arab-Melayu, Suku Jawa, Suku Lombok-Sasak, Suku Cina/ *Tiong Hoa*, dan suku Manggarai dari Flores, Sumba dan Ende.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus wilayah penelitian yaitu wilayah kabupaten Bima provinsi Nusa Tenggara Barat yang berlokasi di desa Renda dan Ngali kecamatan Belo. Daerah Bima merupakan salah satu wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan berada di bagian paling timur pulau Sumbawa, bersebelahan dengan kabupaten Dompu di wilayah bagian baratnya. Desa Ngali dan desa Renda berada di kecamatan Belo yang berjarak sekitar 15,60 km dari ibukota kabupaten Bima. Kecamatan Belo berada disebelah selatan kota Bima.

Wilayah kecamatan Belo memiliki luas 44,75 km², luas lahan persawahan sebesar 22,48%, luas lahan perkebunan sebesar 16,71%, bangunan dan pekarangan seluas 3,50% dan hutan negara seluas 0,8%. kecamatan Belo memiliki pusat pemerintahan di desa Cenggu yang berjarak 15,60 km² dari ibukota kabupaten Bima. Berada di daerah dengan Ketinggian 23 dpl, wilayah kecamatan Belo terdiri dari 9 desa yaitu desa Ngali, Renda, Ncera, Lido, Cenggu, Runggu, Soki, Roka, dan desa Diha.



Gambar 1.2: Luas Wilayah Kecamatan Belo

Dilihat dari grafik tersebut, wilayah yang paling luas di kecamatan Belo dalam persentase yaitu desa Lido yang meliputi 11,1% dan luas terkecil yaitu desa Diha seluas 0,65%. Sementara luas wilayah desa Ngali 6,79% dari wilayah kecamatan Belo, dan luas wilayah desa Renda 6,51% dari wilayah kecamatan Belo. Dalam grafik luas. Keseluruhan dari wilayah kecamatan Belo, desa Renda dan Ngali bisa dikategorikan memiliki luas yang sama dengan posisi bersebelahan antara yang satu dengan yang lainnya.

Tabel 1.1: Jumlah Penduduk Desa Ngali dan Desa Renda Kecamatan Belo

Desa	Kepala Keluarga	Laki-laki	Perempuan	Jumlah penduduk
Ngali	2.536	3.116	3.315	6.435
Renda	1.427	2.406	2.692	5.098

Penduduk desa Ngali dan desa Renda kecamatan Belo berdasarkan data BPS Kecamatan Belo dalam angka tahun 2016, desa Ngali mencapai 6.435 jiwa, dan terdiri dari 2.536 kepala keluarga, sementara desa Renda sebesar 5.098 jiwa yang terdiri dari 1427 kepala keluarga. Berdasarkan tingkat pendidikan sumber daya manusia sudah mencapai standar tingkat tinggi, mulai dari jenjang pendidikan sekolah dasar hingga tingkatan Sarjana, Magister dan Doktor. Sebagian besar dari pendidikan terakhir warga desa yaitu pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, dapat dilihat melalui table 1.2 berikut.

Table 1.2: Mata Pencaharian Warga Desa Ngali dan Renda Kecamatan Belo

No.	Jenjang Pendidikan	Desa Ngali	Desa Renda
1.	SD/ sederajat	1.494	3.743
2.	SMP/ sederajat	688	492
3.	SMA/ sederajat	571	813
4.	Diploma	61	6
5.	Sarjana (S1)	59	29
6.	Magister (S2)	10	15
7.	Doktor (S3) dan Profesor	5	3
8.	Belum/ tidak sekolah	3.547	-
Jumlah		6.435	5.098

Mata pencaharian masyarakat desa Ngali dan Renda lebih dominan ke pertanian dan buruh tani, selebihnya berprofesi sebagai pedagang, wiraswasta, pengrajin, PNS dan lainnya.

Tabel 1.3: Mata Pencaharian Masyarakat Desa Ngali dan Renda Kecamatan Belo

No.	Profesi	Desa Ngali	Desa Renda
1.	Petani	5.042	2.973
2.	Buruh tani	321	331
3.	Pedagang	20	31
4.	Wiraswasta	20	7
5.	Pengrajin	5	7
6.	PNS	17	21
7.	DII	1.010	1.728
Jumlah		6.435	5.098

Konflik dan Penanganan Hukum di Daerah Bima

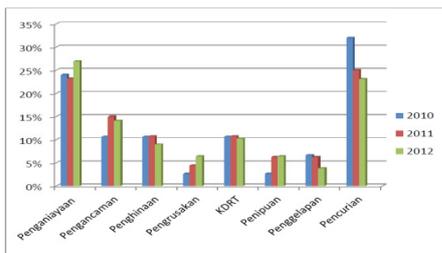
Peningkatan kasus tindak pidana dan kekerasan di Kecamatan Belo pada tahun 2013-2014 ini juga seiring dengan perkembangan kasus yang tidak tertangani oleh kepolisian sebanyak 131 kasus pada tabel 1.4 tentang penyelesaian kasus tindak pidana oleh kepolisian. Kasus pidana di desa-desa kecamatan Belo yang diantaranya terjadi konflik antara masyarakat desa Ngali dan Renda. Dalam artian konflik yang terbangun di masyarakat desa tidak dapat dipisahkan dari peranan aktif kepolisian dalam menyerap dan menangani kasus di masyarakat secara tuntas tanpa menimbulkan rasa permusuhan atau saling curiga antara desa satu dengan desa yang lainnya.

Tabel 1.4: Jumlah Kasus Tindak Pidana dan Kekerasan berdasarkan Data Kepolisian Kabupaten Bima Tahun 2013-2015

No	Kepolisian Resort	Tahun		
		2013	2014	2015
1	Polsek Monta	45	78	...
2	Polsek Parado	10	1	...
3	Polsek Bolo	108	131	...
4	Polsek Madapangga	59
5	Polsek Woja	60	116	...
6	Polsek Belo	138	92	...
7	Polsek Donggo	53	21	...
8	Polsek Sanggar	7	4	...
9	Polsek Tambora	4	1	...
Jumlah		484	444	

Sumber: Hasil olah data dari BPS kabupaten Bima 2016

Berikut Gambar 1.3 terkait data tindakan kriminal di kecamatan Belo Berdasarkan kecenderungan jenis kasus tindak pidana pada tahun 2010 sampai 2012 berdasarkan data Kepolisian RI. Resort Bima, Sektor Belo tahun 2015.

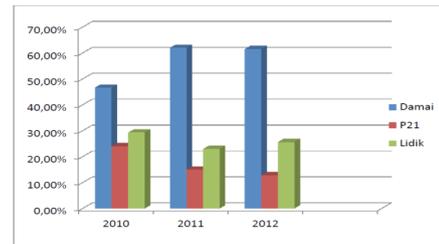


Gambar 1.3: Berdasarkan Kecenderungan Jenis Kasus Tindak Pidana tahun 2010-2012

Berikut Tabel 1.4 tentang penyelesaian kasus tindak pidana berdasarkan data kepolisian daerah Bima pada tahun 2015 diolah berdasarkan data BPS kabupaten Bima dalam angka tahun 2016 bahwa terdapat 523% kasus di kabupaten Bima terkait tindak pidana, hal ini belum termasuk yang tidak dilaporkan.

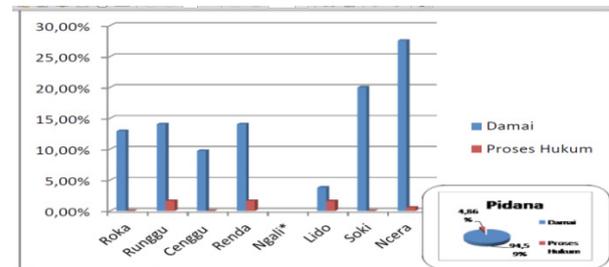
Dari data yang terhimpun di Kepolisian Sektor Belo, penyelesaian kasus di kepolisian mencapai 62% kasus atau sebanyak 265 kasus selama tiga tahun mulai 2010-2012. Pada tahun 2010 sebanyak 45% kasus diselesaikan secara perdamaian, tahun 2011 sebanyak 60% kasus diselesaikan secara damai, dan tahun 2012 kasus didamaikan sebanyak 60% kasus. Penyelesaian kasus lewat kepolisian ini bisa dikatakan secara damai-kekeluargaan yakni tanpa proses lebih lanjut

dipengadilan. Tidak lebih dari 24% diantaranya melanjutkan ke pengadilan, dibawah 30% kasus masih dalam proses penyidikan.



Gambar 1.4: Kasus berdasarkan penyelesaian kasus tahun 2010-2012

Daerah Bima masih memiliki hambatan dalam akses keamanan, hal ini dapat dilihat melalui tabel penyelesaian kasus oleh kepolisian kabupaten Bima. Persentase kasus tindak pidana yang ditangani oleh kepolisian sebanyak 523% kasus, terdiri dari kasus yang terselesaikan sebanyak 954 kasus sementara 467 kasus lainnya ditangani secara adat kedaerahan atau dianggap masih ngambang. Kasus terbanyak yang tidak terselesaikan atau diselesaikan secara hukum oleh kepolisian yaitu terdapat di polsek Belo terdapat 164 kasus sementara yang terselesaikan hanya 23 kasus, 141 kasus lainnya tidak tertangani.



Gambar 1.5: Kasus pidana berdasarkan desa tahun 2010, 2011, dan 2012

Berdasarkan fakta data dari polsek Bolo yaitu hanya 83 kasus yang terselesaikan dari 162 kasus tindak pidana. Sementara di Polsek Woja menyelesaikan kasus tindak pidana sebanyak 63 kasus tindak pidana dari 113 kasus tindak pidana. Pada tabel 1.5 tersebut menunjukkan angka keamanan di kabupaten Bima khususnya di kecamatan Belo masih mengalami hambatan dalam penyelesaian kasus-kasus yang terjadi pada masyarakat.

Tabel 1.5: Penyelesaian Kasus Tindak Pidana di Kepolisian Resort Kabupaten Bima Tahun 2013-2015

No	Kepolisian Resort	Laporan		Persen-tase
		Jumlah Kasus	Kasus Selesai	
1	Satuan Reskrim Polres Bima	282	229	81%
2	Satuan Narkoba Polres Bima	2	4	200%
3	Polsek Woja	113	63	56%
4	Polsek Belo	164	23	14%
5	Polsek Monta	101	29	29%
6	Polsek Donggo	47	23	49%
7	Polsek Bolo	162	83	51%
8	Polsek Madapangga	67	12	18%
9	Polsek Sanggar	14	1	7%
10	Polsek Tambora	0	0	0%
11	Polsek Parado	2	0	0%
12	Polsek KPPP Udara	0	0	0%
Jumlah		954	467	523%

Sumber: Hasil Pengolahan Data dari Polres Kab. Bima tahun 2015

Faktor Penyebab Konflik di Masyarakat Desa Ngali dan Renda Kecamatan Belo

Perbedaan karakter individu dalam suatu desa meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Setiap perbedaan ini terdapat karakter dasar yang mengikat keadaan suatu anggota masyarakat, yaitu norma dan etika. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda, Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya (Poloma, 2004).

Faktor penyebab konflik di desa Renda dan desa Ngali, Coser lebih memandang bahwa tidak adanya konflik tidak bisa dianggap sebagai petunjuk kekuatan dan stabilitas dari hubungan. Konflik yang diungkapkan merupakan sebagai tanda-tanda yang hidup dari hubungan sosial, sedangkan dengan ketiadaan konflik dapat berarti penekanan masalah-masalah yang menandakan akan ada suasana yang benar-benar kacau (Poloma, 2004: 113). Konflik dalam masyarakat muncul dari interaksi individu antara satu dengan yang lain secara aktif. Adapun pertunjukan konflik merupakan situasi yang diakibatkannya.

Perbedaan pemahaman dalam menyikapi persoalan yang melibatkan individu yang satu dengan individu yang lainya menjadi penyebab skala konflik membias pada konflik antar desa, konflik antar individu yang seharusnya dapat diselesaikan keranah hukum dan musyawarah mufakat dalam konsep kearifan budaya *Maja labo dahu* masyarakat Bima, justru berkembang menjadi konflik antar desa. Dalam hal ini peranan pemerintah daerah Bima untuk menemukan solusi sekaligus sebagai tokoh sentral penyelenggara Musyawarah dan mufakat secara tidak langsung dapat memecahkan akar persoalan yang ada. Persoalan kemudian ketika korban bermunculan sebagai akibat dari tindak kekerasan dalam konflik baik melibatkan masyarakat yang berkonflik atau pihak kepolisian yang ikut meleraikan konflik dengan tindakan tegas, cenderung melahirkan persoalan yang baru dalam masyarakat.

Tindakan kekerasan sebagai akibat dari konflik menimbulkan keprihatinan tersendiri dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, konflik yang menimbulkan korban jiwa maupun material dalam masyarakat desa khususnya yang terjadi di desa Renda dan Ngali kecamatan Belo Kabupaten Bima ikut menambah angka tindak kekerasan dalam masyarakat. Coser meyakini bahwa semua hubungan sosial memiliki tingkat antagonisme tertentu, ketegangan, atau perasaan-perasaan negatif lainnya (Johnson, 1986: 199)

1. Sikap Sentime dalam Masyarakat Desa Renda dan Ngali

Konflik yang terjadi antara masyarakat desa Ngali dan Desa Renda telah mengalir dari sejarah panjang munculnya tradisi *Ndempa Ndiha* (Perkelahian Massal) yaitu tradisi perkelahian massal yang melibatkan kedua warga desa saling menunjuk kekuatan fisik dalam gelanggan perkelahian untuk menunjukan siapa yang menjadi Jawara terkuat Desa. Tradisi *Ndempa ndiha* dalam masyarakat desa Ngali muncul pasca perlawanan masyarakat Bima terhadap penetapan Aturan *Bea Kepala* (Pajak) yang tinggi dari Belanda atas masyarakat Bima (Tajib, 1995). Konflik kedua desa bisa juga dikatakan sebagai sentime masa lalu atas politik adudomba dari imperialisme Belanda, dalam hal ini tradisi *Ndempa*, tradisi tersebut berawal dari sengketa yang kemudian menjadi tradisi antar warga untuk saling

menunjukan kekuatan otot. Solidaritas kelompok terbangun dalam pola kehidupan sehari-hari, Sebuah pemukiman dengan corak masyarakat yang cenderung homogen seperti pemukiman padat penduduk dengan tingkat ekonomi yang hampir setara, Pola interaksi yang terbangun cenderung sangat intim (Poloma, 2004).

Polarisasi konflik dalam bentuk yang realistik, yaitu aksi saling serang antar kampung secara terbuka menjadikan kedua belah pihak saling siaga. Konflik secara terbuka ini membuka ruang bagi terungkapnya rasa kekecewaan dari kelompok warga yang sebelumnya telah tertanam konflik yang laten dalam hubungan yang terjalin. Konflik antara desa Renda dan Ngali kecamatan Belo yang letaknya saling berbatasan langsung, dengan karakter dan mata pencaharian ekonomi yang sama, rentan terhadap hubungan yang disharmonis. Konflik realistik muncul dari kekecewaan atau tuntutan khusus yang berlangsung didalam hubungan sosial dan diarahkan ke pihak yang dianggap mengecewakan. Sementara konflik non-realistik tidak berasal dari tujuan persaingan yang antagonis akan tetapi muncul dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan (Poloma, 2004: 110).

Konflik realistik bertujuan sebagai alat untuk tercapainya suatu tujuan tertentu, apabila tujuanya tercapai maka penyebab dari sumber konflik akan hilang. Pada konflik ini sering muncul sebagai stimulus pada perubahan sosial, terutama dalam menciptakan rangsangan sosial yang lebih menguntungkan sistem. Sedangkan pada konflik non-realistik lebih terarah pada sumber konflik yang sebenarnya (Johnson, 1986: 202). Konflik yang tercipta memiliki muatan kepentingan yang sekaligus merupakan suatu kesepakatan pemegang kekuasaan untuk menciptakan kerusuhan-kerusuhan, kondisi *violence* dalam bentuk penjarahan, pemerkosaan, perampokan dan pembunuhan (Dermatoto, 2010:7).

2. Dendam yang Berkelanjutan

Konflik antar desa Ngali dan desa Renda bila ditelusuri secara sosio-budaya, hampir tidak bisa dipisahkan dengan Tradisi *Ndempa* (perkelahian massal) yang pernah tumbuh subur di desa tersebut. Tradisi lama yang sempat hilang atau yang telah mengalami perubahan menjadi konflik yang menggunakan senjata tajam dan senjata api tersebut sebagai salah satu faktor pemicu munculnya konflik yang berkelanjutan hingga kini. Akar konflik dari sejarah sentime masa lalu tersebut cenderung dikaburkan oleh persoalan yang muncul sebagai penyebab konflik yang ada. Dalam hal ini faktor penyebab konflik antar desa Renda dan desa Ngali yaitu dipicu oleh perkelahian antar pemuda di kedua desa.

Kondisi sosial tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh Lewis a. Coser bahwa munculnya konflik yang bersifat realistik dapat disebabkan melalui sentime-sentime secara emosional yang menyebabkan distorsi yang diakibatkan oleh pengungkapan ketegangan tidak mungkin berlangsung pada situasi konflik lain. Dengan demikian energi-energi agresif mungkin terakumulasi dalam proses interaksi lain sebelum situasi ketegangan diredam (Poloma, 2004: 111). Pada kasus konflik di desa Renda dan desa Ngali, konflik lebih banyak di sebabkan oleh permusuhan akibat dendam yang berkelanjutan.

3. Peranan Pemerintah Daerah Bima dalam Penyelesaian Konflik antar Desa

Aksi saling serang antar desa pada masyarakat yang berkonflik mengakibatkan korban jiwa, penggunaan senjata tajam maupun jenis senjata api (rakitan) menambah skala konflik menjadi amat

mematikan, kondisi masyarakat yang terlibat konflik tidak hanya mendapat tekanan secara fisik saja dari pihak lawan, akan tetapi juga berdampak secara psikologis, belum lagi terhambatnya kelancaran aktifitas ekonomi masyarakat yang bertikai. Sikap cepat tanggap dari pemerintah dan instansi keamanan terkait menjadi penting untuk ikut melerai konflik dan melakukan rekonsiliasi dengan cepat. Upaya pendeteksian dini potensi konflik dan tindakan persuasif sebagai upaya resolusi konflik. Konflik terjadi melalui perubahan sosial, Perubahan terjadi secara radikal seiring dengan membaranya konflik, ketika disertai dengan kekerasan, akan terjadi perubahan struktural secara cepat dan mendadak (Ritzer, 2012: 455).

Dalam kasus konflik antara desa Ngali dan desa Renda, Pemerintah Daerah Bima kurang maksimal dalam upaya menyelesaikan akar masalah dalam masyarakat, Bupati Bima sebagai penyelenggara Negara harus lebih intensif untuk ikut menyelesaikan setiap potensi konflik yang ada. Melakukan silaturahmi dengan warga bukan hanya pada waktu suksesi Pemilukada semata, masyarakat justru lebih membutuhkan perhatian ketika waktu berkonflik. Secara psikologis akan mampu membuka ruang pada masyarakat desa yang sedang berkonflik untuk saling mengoreksi diri untuk menemukan resolusi perdamaian yang tepat. Hal ini memberikan gambaran bahwa peranan pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah itu tidak maksimal.

4. Lemahnya Penegakan Hukum

Penegakan hukum di wilayah kecamatan Belo cenderung lemah, hal ini dilihat dari karakter masyarakatnya yang keras dan cenderung melakukan perlawanan terhadap hukum. Lemahnya penegakan hukum memberikan peluang pada tindakan-tindakan kriminal terus menerus menggumpal menjadi sebuah potensi konflik yang lambat laun menjadi permasalahan pemicu konflik besar. Ketika dalam penanganan kasus penyelesaian konflik, masyarakat Ngali berpandangan bahwa pihak kepolisian melakukan keberpihakan terhadap masyarakat Renda, dan melakukan pengepungan terhadap masyarakat desa Ngali, pihak kepolisian lebih cenderung mengamankan wilayah desa Renda ketimbang warga desa Ngali, indikator dari dugaan itu diperkuat oleh dibangnya posko keamanan kepolisian di desa Renda. indikator yang kedua yaitu dengan adanya penembakan terhadap warga Ngali yang menyebabkan meninggal dunianya seorang warga desa Ngali. Hal ini menghambat proses penegakan hukum pada masyarakat yang berkonflik. Harapan memberikan penyadaran hukum terhadap masyarakat Ngali dan Renda, justru melahirkan perlawanan dari masyarakat terhadap kepolisian yang hendak menyelesaikan masalah serta menghambat proses penegakan hukum.

Bentuk-Bentuk Resolusi Konflik Masyarakat di Desa Ngali dan Renda Kecamatan Belo

Konflik sosial mengacu pada sebuah bentuk interaksi sosial yang bersifat destruktif antara masyarakat desa Renda dan Ngali, saling menunjukkan sikap permusuhan dimana masing-masing pihak berusaha untuk saling mengalahkan atau bahkan menghilangkan pihak lainnya. Sebagai sebuah bentuk interaksi sosial yang bersifat negatif, konflik sosial dapat dipahami sebagai akibat tidak terbangunnya kontak sosial dan komunikasi sosial diantara masyarakat desa yang terlibat konflik. Dengan demikian sebuah interaksi sosial dapat menjadi sebuah kerjasama atau konflik, secara teoritis dapat diprediksi dari apakah kontak dan komunikasi sosial antara kedua pihak yang sedang berkonflik tersebut bersifat positif atau negatif (Poloma, 2004).

Penyelesaian konflik yang bersifat menekan dari pihak kepolisian atau militer, tidak menyelesaikan masalah. Tindakan yang bersifat menekan sumber masalah tanpa adanya tawaran solusi yang jelas, bisa dikatakan itu akan menjadi sumber konflik laten bagi munculnya konflik lanjutan kedepannya. Konflik membutuhkan peranan banyak pihak dalam menyelesaikannya. Resolusi konflik yang dapat di tawarkan dalam kasus Masyarakat desa Renda dan Ngali tahun 2009-2010 tersebut yaitu: pertama, menghidupkan kembali nilai Budaya *Maja Labo Dahu* di masyarakat Bima. Kedua, penyelesaian konflik lewat pendekatan kearifan lokal merupakan salah satu jawaban dari masalah yang muncul ditengah masyarakat. Ketiga, penegakan hukum oleh pihak kepolisian harus betul-betul merata, tanpa pandang bulu yang berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial dan mis-kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan hukum. Keempat, peranan dari pemerintah akan pentingnya terhadap kesadaran hukum itu sangat diperlukan.

Proses Resolusi Konflik Warga Desa Renda dan Desa Ngali Kecamatan Belo

Penyelesaian konflik antara desa Renda dan Ngali bukanlah hal yang mudah, dan juga konflik yang berlangsung di kedua desa ini cukup berdarah. Membutuhkan banyak energi untuk dikerahkan dalam melakukan urung-rembung terhadap masalah yang sedang terjadi. Konflik yang berawal dari solidaritas kelompok didalam masyarakat Renda maupun desa Ngali ini cukup memberikan alasan yang kuat bagi kita untuk melirik aktivitas masyarakat sebagai bentuk solidaritas kelompok. Dalam mekanisme penyelesaian konflik Lewis A. Coser tetap ada ditengah masyarakat/kelompok yang tidak terlihat atau yang bersifat laten (dibawah permukaan), solidaritas dan kekompakan yang nampak. Dalam mekanisme penyaluran konflik, ketegangan dapat terungkap melalui berbagai bentuk tindakan, baik antar pribadi maupun kelompok. Penyaluran konflik (*safety valve*) dapat berupa pengaturan terhadap resolusi konflik itu sendiri dari dalam masyarakat. Katup penyelamat merupakan suatu mekanisme khusus yang dipakai untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial (Poloma, 2004: 108).

Proses penyelesaian konflik antara desa Renda dan desa Ngali terjadi berlangsung secara permanen, dan bersifat sementara. Penyelesaian konflik lewat musyawarah mufakat, dan lewat kepolisian atau pengadilan hanya bersifat sementara saja, pada substansinya permasalahan utama dari konflik tersebut belum tersentuh oleh berbagai pendekatan penyelesaian konflik pemerintah daerah Bima. Konflik yang terpendam (*laten*) terus mengontrol dan menumbuh kembangkan rasa permusuhan dari masyarakat itu sendiri. Potensi konflik antar desa di desa Renda dan desa Ngali bukan hanya terlahir sebagai solidaritas sosial semata, akan tetapi ada faktor yang paling mendasar pada semestinya mendapatkan sentuhan langsung dari pemerintah Kabupaten Bupati dan walikota Bima tanpa harus mengesampingkan persoalan-persoalan lainya dalam masyarakat.

Katup pengaman konflik yang digagaskan Coser bukanlah solusi tanpa syarat, penyaluran konflik untuk menghindari dampak konflik yang menghancurkan objek aslinya sehingga menjadi konflik yang positif atau meminimalisir dampak negatif dari konflik sosial itu sendiri. Penyaluran konflik di dalam masyarakat desa Renda dan Ngali cenderung bersifat permanen dan sementara, hal ini ditempuh lewat musyawarah dan mufakat, adapun yang melanggar dari kesepakatan damai tersebut, maka konflikpun akan kembali muncul dengan potensi konflik yang

ada. Hal ini perlu adanya katup pengaman konflik sebagaimana yang ditawarkan oleh Coser, Katup pengaman berfungsi sebagai jalan keluar dari konflik yang meredakan permusuhan, tanpa Katup penyelamat maka hubungan-hubungan sosial sebagai pihak yang bertikai akan semakin tajam (Poloma, 2004: 108).

Proses penyelesaian konflik dalam konsep *safety valve* konsep Lewis a. Coser penyelesaian konflik dengan menggunakan sistem penyaluran konflik yang bersifat negatif menjadi fungsi positif, konflik yang bersifat destruktif disalurkan ke aktifitas masyarakat yang lebih membangun dan menguntungkan bagi kerukunan perdamaian masyarakat. Pemerintah daerah Bima berperan penting untuk memfasilitasi peran dan kegiatan masyarakat khususnya dalam hal ini pemuda untuk lebih berjiwa nasionalisme yang membangun, serta merekonsiliasi konflik yang ada. Konflik antar warga yang terjadi bukanlah suatu hal yang terjadi begitu saja, berlangsungnya proses menginternalisasikan kekompakan kelompok itu sendiri dalam meningkatkan solidaritas internal, Coser memandang bahwa ketegangan antar kelompok masyarakat disebabkan oleh persoalan internal yang berpotensi merusak struktur sosial yang ada, kemudian menghindari potensi tersebut dengan memproyeksikan kesuatu sumber yang ada diluar kelompok tersebut.

Musyawarah dan mufakat dalam konteks mempertemukan tokoh masyarakat yang berkonflik berlangsung dalam skala lokal desa sebagai bentuk penyelenggaraan kearifan local budaya *maja labo dahu* sebagai upaya menemukan penyelesaian konflik antara warga desa Renda dan Ngali, kesinambungan konflik akibat muncul dari sikap dan tindakan anggota kelompok warga yang cenderung menyalahi aturan-aturan adat yang telah disepakati bersama. sebenarnya tingkat bertahannya perdamaian tersebut bukanlah pada proses perdamaian atau resolusi konflik, akan tetapi lebih mengarah pada kesiapan masyarakat itu sendiri dalam menerima kondisi yang ada.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian resolusi konflik antar masyarakat desa Ngali dan desa Renda kecamatan Belo Kabupaten Bima, Penelitian yang berlokasi di kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, bahwa Konflik antara desa Renda dan desa Ngali telah berlangsung dalam waktu yang lama, Penyelesaian konflik antara desa Renda dan Ngali bukanlah hal yang baru, dan juga konflik yang berlangsung di kedua desa ini cukup berdarah dan memakan korban. Konflik yang dilatarbelakangi oleh solidaritas kelompok didalam masyarakat desa Renda maupun desa Ngali ini cukup memberikan alasan yang kuat bagi kita untuk melirik aktivitas masyarakat sebagai bentuk solidaritas kelompok.

Dari hasil analisis studi dengan menggunakan teori konflik Lewis A. Coser, bahwa konflik akibat solidaritas kelompok di internal desa dalam menjaga hubungan yang harmonis, adat, norma dan nilai kebersamaan yang terbangun dari rasa tanggungjawab moral dalam mempertahankan desa dari tindakan pelanggaran anggota masyarakat desa lain. Resolusi konflik antar desa menggunakan pendekatan nilai Budaya *Maja labo dahu*. faktor penyebab dan proses resolusi konflik antar warga dengan pendekatan kearifan lokal *Maja labo dahu*, melalui teori konflik Lewis a. Coser dalam konsep Solidaritas Sosial dan katup Penyelamat sosial (*Safety-Valve*). Konflik antar desa dilatarbelakangi rasa dendam akibat harga diri desa yang terganggu oleh tindakan dari warga desa lain yang melanggar etika dan menyakiti anggota warga. Proses pencapaian kesepakatan damai melalui Musyawarah dan Mufakat dengan

menjunjung tinggi Nilai *Maja labo dahu* dan diikuti dengan penetapan sanksi bagi pelaku pelanggaran dan kesanggupan Mengganti kerugian yang diakibatkannya.

Dalam menghasilkan kualitas penelitian konflik yang lebih terbaru, diharapkan kepada Pemerintah daerah untuk dapat mengembangkan lembaga riset konflik di Bima, khususnya daerah Bima dikenal sebagai daerah yang potensi konfliknya terbesar di profinsi Nusa Tenggara Barat, bahwa penanganan konflik secara cepat dan pendeteksian dini potensi konflik dipandang perlu, hal ini untuk meminimalisir konflik yang bersifat destruktif serta kerugian yang diakibatkannya. Secara Akademis, Pengembangan penelitian konflik sangat dibutuhkan untuk mewujudkan keutuhan bangsa yang damai dan sejahtera kedepannya sebagai penerepan dari prinsip *Agent of Change* dan *Agent Of Control*. Penelitian ini masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut, demi memperkaya khasanah keilmuan dan pengetahuan kita semua terhadap konflik komunal ditingkatan desa maupun kelurahan di seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, H. I. 2004. Akar Konflik Sepanjang Zaman, Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Ardiansyah, S. I. 2010. Konflik Etnis Samawa dengan Etnis Bali: Tinjauan Sosial Politik dan Upaya Resolusi Konflik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Samawa, Sumbawa Besar, NTB. Vol.23/4, pp 286-292. Diunduh dari: <http://www.journal.unair.ac.id/filer/PDF/04Syaifuddin>.
- Bugin, B. 2013. Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Demartoto, A. 2010. Strukturalisme Konflik: Pemahaman Akan Konflik Pada Masyarakat Industri Menurut Lewis Coser dan Ralf Dahrendorf. *Dilema, Jurnal Sosiologi FISIP Universitas Sebelas Maret*. ISSN : 0215 - 9635, Vol. 24/1. Diunduh dari: <https://eprints.uns.ac.id/12954/>
- Eka, H. Ar. et. al. 2013. Integrasi Sosial Dalam Masyarakat Multi Etnik. *Walisongo, Vol. 21/1*. Diunduh dari: <http://www.journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/article/download/242/223>.
- Faisal, S. 1995. Format-format penelitian sosial, dasar-dasar dan aplikasi. Cetakan ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Giddens, A. 1986. Human Society a Reader. Cambridge: Polity Press.
- Hatington, S. 1996. Benturan Antar Peradaban dan masa depan politik dunia: The Clash of Civilization: and The Remaking off World Order. UK: Free Press.
- Hilal, A. W. 2011. Understanding Conflict Resolution. *Universitas Muslim Aligarh, Aligarh, INDIA*. Vol. 1/2.
- Hoda, L. 2000. How to Resolve Conflict in The Work Place (mengelola konflik ditempat kerja). Jakarta: Gramedia pustaka utama.
- Ilyas. 2014. Kajian Penyelesaian Konflik Antar Desa Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. *Academica fisip UNTAD. Vol. 06/1*. Diunduh dari: <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/acad-emica/article/view/2238>.
- Jamuin, M. 2004. Manual advokasi: Resolusi Konflik Antar Etnik dan Agama. edisi kedua. Kartasura: Ciscore Indonesia.
- Jamil, M. M. et, al. 2007. Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi, dan Implementasi Resolusi Konflik. Semarang: WMC (Walisongo Mediation Centre).

- Johnson, D. P. 1986. Teori Sosiologi Klasik dan Modern. University of florida. Jilid II. (Diterjemahkan oleh Robert M.z. Lawang). Jakarta: Gramedia.
- Kinseng, R. A. 2014. Konflik Nelayan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kimberly, T. 2006. The Micropolitics of Reconciliation in Postwar Peru. *Journal of conflict resolution. Department of anthropology harvard university. Vol. 50/3, pp 433-457.*
- Miall, H. et al., 2002. Resolusi Damai Konflik Kontemporer; Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras. Jakarta: Raja Grafindo persada.
- Muhlis. 2013. Traditional Conflict and its Interventions. *Walisongo.Vol. 21/1.* Diunduh dari: <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/article/view/238>
- Moleong, L. J. 2012. Metode Penelitian Kualitatif.: Bandung: Remaja Rosda Karya Offset.
- Natsir, M. et al. 2013. *Communal Conflict Resolution Model in Bima Regency West Nusa Tenggara Province. Departement Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Fellowship pasca sarjana. Vol. 1/12.* Diunduh dari: <http://www.ijern.com/journal/December-2013/19.pdf>
- Pickering, P. 2001. How to Manage Conflict (kiat menangani menangani konflik). Edisi ketiga. Win-win solution. Jakarta: Erlangga.
- Poloma, M. M. 2004. Sosiologi Kontemporer. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ritzer G. 2012. Teori Sosiologi: Dari sosiologi klasik sampai perkembangan terakhir postmodern. Edisi kedelapan. Pustaka Pelajar.
- Rozi, et al., 2006. Kekerasan Komunal: Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sanginga, P. C. et al., 2007. The dynamics of sosial capital and conflict management in multiple resource regimes: a case of the southwestern highlands of Uganda). *Ecology and Society. International Centre for Tropical Agriculture -CIAT, Africa Highlands Initiative, Natural Resources Institute. Vol. 12/1.* Diunduh dari: <file:///C:/Users/ACER/Downloads/ES-2006-1847.pdf>
- Sukmawan, P. Y. 2012. Melerai Konflik Antar Desa (Studi sengketa air desa udanuwuh dengan desa dlingo). *Studi pembangunan interdisiplin (kritis).Vol. 21/2. Pp.155-173*
- Suprpto. 2013. Revitalisasi Nilai-nilai Kearifan Lokal bagi Upaya Resolusi Konflik. *Walisongo, IAIN Mataram. Vol. 21/1.* Diunduh dari: <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/article/viewFile/235/216>
- Sulaeman, M. M. 2015. Resolusi Konflik Pendekatan Ilmiah Modern Dan Model Tradisional Berbasis Pengetahuan Lokal (Kasus di Desa Gadingan Kecamatan Sliyec Kabupaten Indramayu). *Sosiohumaniora. Universitas Padjadjaran Bandung. Vol. 17/1. pp 41-48.* Diunduh dari: <http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/5671>
- Susan. N. 2009. Sosiologi konflik dan isu-isu konflik kontemporer. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2005. Metode Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo, H.B. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Tajib, A. 1995. Sejarah Bima Dana Mbojo. Jakarta: Harapan Masa PGRI.